



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

Jalan Soekarno Hatta No.260 Bandung 40286
Telp. (022) 7509667 - 7506657 - 7506658 Fax. (022) 7506654

RENCANA AKSI KINERJA

Nama Lembaga : KPU Kota Bandung
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang akan dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan				Perkiraan Biaya	Pelaksana
				T1	T2	T3	T4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi									
1. Pelaksanaan Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dan PAW									Subbag Teknis dan Hupmas
a. Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Terkait Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Jumlah Lembaga yang Terfasilitasi dan yang Telah Dibina Terkait Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1 Lembaga	- Pengelolaan Desain Surat Suara, Formulir, dan Alat Bantu Tuna Netra Pemilu/Pemilihan					226.620.000	
b. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	- Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100 %	Sosialisasi jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan ke Stakeholder	√	√	√	√		-
	- Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100 %	Penyusunan simulasi dapil Kota Bandung	√	√	√	-		-
c. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Bandung dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	Penyampaian PAW secara SOP	√	√	√	√		-
d. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100 %	Pelayanan data Peserta Pemilu	√	√	√	√		-
e. Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	1 Draft	Peyusunan desain template	√	√	-	-		-
f. Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	- Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Dokumen (dalam Pilkada)	Sosialisasi SOP petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	√	√	√	√		-
	- Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	40 %	Monitoring kepengurusan dan keanggotaan parpol yang dimutakhirkan	√	√	√	√		-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang akan dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan				Perkiraan Biaya	Pelaksana	
				T1	T2	T3	T4			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2. Penyusunan Keputusan KPU										Subbag Hukum
a. Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Bandung sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kota Bandung yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %	1. Penyusunan Keputusan KPU Kota Bandung beserta Penyusunan Abstraksi Keputusan Ketua KPU Kota Bandung , Perubahan/ Revisi Keputusan KPU)	√	√	√	√		-	
			2. Harmonisasi Produk Hukum melalui kegiatan FGD Aturan Hukum Kepemiluan / Kajian Regulasi KPU	√	√	√	√		-	
b. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	- Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang- undangan	97 %	Penataan dan pendokumentasian Produk Hukum : UU, Peraturan, Penetapan dan Non Peraturan Perundang-undangan)	√	√	√	√		-	
	- Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	93 %	Pengelolaan JDIH KPU Kota Bandung, Pengunggahan Produk Hukum dalam laman resmi JDIH dan Media Sosial Resmi JDIH , Pengelolaan Koleksi Produk Hukum dalam Perpustakaan JDIH , Rapat Triwulan, Rapat Tahunan dan Laporan Pengelolaan JDIH	√	√	√	√		-	
3. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum										Subbag Hukum
Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	- Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	3 Perkara	kegiatan Non Litigasi Tahapan Pemilu 2024	√	√	√	√		-	
	- Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	1 Perkara	-						-	
	- Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90 %	Penyelesaian Sengketa Hukum Tahapan Pemilu 2024 (Bawaslu, PTTUN, DKPP jika terdapat sengketa)	√	√	√	√		-	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang akan dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan				Perkiraan Biaya	Pelaksana
				T1	T2	T3	T4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat									
a. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih	95 %	Penambahan sarana rumah pintar pemilu	√	√	√	√		Subbag Teknis dan Hupmas
b. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	95 %	Pendidikan pemilih kepada tokoh masyarakat dan agama	√	√	√	√		
c. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	- Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	95 %	Pendidikan pemilih kepada komunitas perempuan	√	√	√	√		
	- Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	95 %	Pendidikan pemilih kepada siswa SMA/SMK/MA	√	√	√	√		
	- Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	95 %	Pendidikan pemilih kepada segmen disabilitas	√	√	√	√		
d. Pendidikan Pemilih Kepada wilayah dengan Partisipasi Rendah, wilayah dengan Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan wilayah dengan Rawan Konflik/bencana	Persentase wilayah dengan Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, wilayah dengan Rawan Konflik/Bencana, dan atau wilayah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	95 %	Pendidikan pemilih melalui Kelurahan peduli pemilu	√	√	√	√		
e. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	- Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	Menjalankan SOP permohonan informasi	√	√	√	√		
	- Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa lokal	100 %	Menjalin kerjasama dengan media lokal Kota Bandung	√	√	√	√		
	- Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %	Menjalankan SOP keterbukaan informasi	√	√	√	√		
f. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	95 %	Menjalin kerjasama dengan media lokal Kota Bandung	√	√	√	√		

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang akan dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan				Perkiraan Biaya	Pelaksana
				T1	T2	T3	T4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik									
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	- Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	90 %	Penyusunan Daftar Kebutuhan Logistik Pemilu/Pemilihan	-	-	√	√		Subbag Keuangan, Umum, Logistik
	- Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100 %	-						
	- Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100 %	Penyusunan standar operasional prosedur distribusi logistik	-	-	√	√		
	- Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	-	-						
a. Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100 %	-						-
b. Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	-	-						-
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi									
a. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	- Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %	Rapat Koordinasi internal Bulanan PDPB, Rapat Koordinasi PDPB bersama Forum PDPB setiap triwulan, dan FGD PDPB	√	√	√	√		Subbag Program dan Data
	- Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100 %	Penyediaan jaringan internet dan sarana media confrence yang aman, handal dan lancar dan pemeliharaan sarana hardware perangkat kerja teknologi informasi	√	√	√	√		
	- Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	65 %	Penggunaan Aplikasi Sidalih Berkelanjutan, SIPOL, SIDAPIL, SIMPAU, SIMONIKA, Website, JDIH, dan E-PPID	√	√	√	√		
b. Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Internal Data dan Informasi	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal Data dan Informasi	1 Layanan	- Pemenuhan Layanan Data dan Informasi	√	√	√	√	34.380.000	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang akan dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan				Perkiraan Biaya	Pelaksana
				T1	T2	T3	T4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02. Program Dukungan Manajemen									
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi									Subbag Program dan Data
a. Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	18 Kegiatan	MOU dengan instansi terkait	-	√	√	√		
b. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 Kali	Pelaksanaan Revisi KPA dan Revisi Kanwil Pembendaharaan Provinsi Jawa Barat	√	√	√	√		
c. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	- Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80 %	Penginputan realisasi anggaran dan realisasi kinerja ke dalam aplikasi SMART dan E-Monev	√	√	√	√		
	- Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90 %	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja	√	√	√	√		
d. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase untuk mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	90 %	Melaksanakan rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022	√	√	√	√		
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian									Subbag Keuangan, Umum, Logistik
a. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	- Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	98 %	Pengelolaan berkas kepegawaian secara digital dan manual melalui Dosir Kepegawaian	√	√	√	√		
	- Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90 %	Penerapan Handkey bagi Pegawai WFO dan presensi online bagi pegawai WFH	√	√	√	√		
b. Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95 %	Pemutakhiran Data Mandiri ASN melalui My SPAK dan SIASN	-	√	√	-		
c. Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	80 %	Pendataan pegawai yang akan mengikuti yang akan mengikuti Inpassing JFT	√	√	√	-		
d. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	150 PPK	-	-	-	-	-		
		453 PPS		-	-	-	-		
		64800 KPPS		-	-	-	-		
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara									Subbag Keuangan, Umum, Logistik
a. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	95 %	Pembukuan bendahara tersusun sesuai standar akuntansi pemerintah	√	√	√	√		

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang akan dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan				Perkiraan Biaya	Pelaksana	
				T1	T2	T3	T4			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
b. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	Laporan Saiba terintegrasi kedalam aplikasi sakti	√	√	√	√		-	
c. terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85 %	Rekonsiliasi laporan keuangan	√	√	√	√		-	
d. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95 %	Penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	√	√	√	√		-	
e. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	- Persentase Kepatuhan dan Keterlibatan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	95 %	Rekonsiliasi data SIMAK BMN	√	√	√	√		-	
	- Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	12 Laporan	Penyusunan Berita Acara Stok Opname Barang Milik Negara	-	√	-	√		-	
f. Terlaksananya layanan dukungan manajemen internal perkantoran dalam administrasi keuangan yang	Jumlah layanan perkantoran dalam adminisrasi keuangan	1 Layanan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	√	√	√	√	2.445.282.000	-	
4.Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor										Subbag Keuangan, Umum, Logistik
a. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	85 %	Penyusunan Data Arsip Statis Pemilu/Pemilihan	-	-	√	√			
b. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	- Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	1 layanan Pemenuhan Kebutuhan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	√	√	√	√	484.798.000,00		
	- Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90 %								
	- Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	80 %								
c. Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	- Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	90 %	1 Unit Pemenuhan Layanan Prasarana Internal	√	√	√	√	22.160.000,00		
	- Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %								
d. Terwujudnya Keamanan dan Keterlibatan di lingkungan KPU Kota Bandung	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Bandung yang dapat ditanggulangi	100 %								
e. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	- Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	90 %		√	√	√	√			
	- Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	90 %								
	- Persentase Gedung dan Gudang yang dapat dipenuhi	50 %								

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang akan dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan				Perkiraan Biaya	Pelaksana	
				T1	T2	T3	T4			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III										Subbag Keuangan, Umum, Logistik
a. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30 %	Pembangunan zona integritas, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan, whistle blowing system, peningkatan SPIP, penanganan pengaduan masyarakat.	√	√	√	√		-	
b. Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,4	Membangun SPIP KPU Kota Bandung dengan terselenggaranya 5 unsur pengendalian, tim salgas SPIP, SOP, SPIP, Laporan Kartu Kendali triwulan dan tahunan	√	√	√	√		-	
c. Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	Peningkatan kompetensi aparat pengawasan dan pengendalian internal melalui diklat teknis	√	√	√	-		-	
d. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90 %	Membangun sistem pengaduan masyarakat di lingkungan KPU Kota Bandung, SOP Pengaduan, Sarana Pengaduan, Pejabat Pengelola Pengaduan, Jangka waktu penyelesaian pengaduan.	√	√	√	√		-	
e. Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	75 %	Menindaklanjuti temuan atas LHP BPK dan APIP	-	√	-	√		-	
f. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	80 %	Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan semester dan tahunan sesuai prinsi-prinsip akuntabilitas kinerja	-	√	-	√		-	
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan										Subbag Keuangan, Umum, Logistik
a. Peningkatan kompetensi SDM KPU	- Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	70 %	Pendataan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dari KPU RI maupun AP	√	√	√	-		-	
	- Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	-	-	-	-	-	-		-	
b. Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dokumen	-	-	-	-	-		-	



Bandung, Januari 2022

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandung,

TITON PRAYOGA